



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng, 10 Agustus 2023
KEPALA DINAS PMDPPA,

H.ABBAS ARAS, SP.M.AP
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 198711 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	: EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	5
	2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	5
	2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
BAB III	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
	3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2023	14
BAB IV	: PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	6
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2023	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksudnya disusun Renja Perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,
- 2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- 3) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan 2018 – 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 adalah :

1. Proses pelaksanaan dan realisasi kegiatan yang cukup lambat karena penggunaan aplikasi barang dan jasa yang tergolong baru memerlukan waktu lebih lama terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Perencanaan yang ada fokus pada tindakan dan belum fokus pada apa yang akan dicapai.
3. Masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh kurangnya data yang valid.

Berdasarkan kendala yang dihadapi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi barang dan jasa dan penyediaan SDM yang kompeten dalam pengoperasiannya.
2. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Mengupayakan pengumpulan data lapangan yang valid melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemdes dan PPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dapat dilihat pada *Tabel 2.1 berikut* :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2023 (Tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 = (7/6)</i>	<i>9 = (5+7)</i>	<i>10 = (9/4*100)</i>			
2	13				100							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2	13.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen						
2	13.1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00	18 Bulan	75,00
2	13.1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	4 Dokumen	100,00

2	13.1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2 Dokumen	100,00
2	13.1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50,00
2	13.1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2 Dokumen	100,00
2	13.1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50,00
2	13.1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	4 Laporan	100,00
2	13.1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100 Persen				
2	13.1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	31 Orang	31 Orang	100,00		100,00
2	13.1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2 Laporan	100,00
2	13.1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen		
2	13.1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	440 Laporan	220 Laporan	166 Laporan	83 Laporan	50,00	303 Laporan	68,86

2	13.1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen				
2	13.1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00	18 Laporan	75,00
2	13.1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Lporan	6 Laporan	50,00	18 Laporan	75,00
2	13.1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah			100 Persen				
2	13.1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 Unit	5 Unit	16 Unit	3 Unit	18,75	8 Unit	25,00
2	13.1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	26 Unit	0	9 Unit	2 Unit	22,22	2 Unit	7,69
2	13.3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang telah menjalin perkjnjian kerjasama			100 Persen				
2	13.3	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan kerja sama desa			100 Persen				
2	13.3	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	1 Kawasan	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	50,00
2	13.4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal			25.00 Persen				
2	13.4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa			100 Persen				

2	13.4	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	168 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	34 Dokumen	50,00	102 Dokumen	60,71
2	13.4	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	36 Dokumen	17 Dokumen	19 Dokumen	5 Dokumen	26,31	22 Dokumen	61,11
2	13.4	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0	0
2	13.4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	136 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	15 Dokumen	22,05	83 Dokumen	61,02
2	13.4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	136 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	1 Dokumen	1,47	69 Dokumen	50,73
2	13.4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	68 Desa	0	68 Desa	0	0	0	0
2	13.5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif			100 Persen				
2	13.5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina			100 Persen				
2	13.5	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	59 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	17 Dokumen	28,81

2	13.5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84 Lembaga	11 Lembaga	21 Lembaga	0	0	11 Lembaga	13,09
2	13.5	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54 Unit	27 Unit	27 Unit	0	0	27 Unit	50,00
2	13.5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	21 Laporan	20 Laporan	1 Laporan	0	0	20 Laporan	95,23
2	13.5	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	58 Dokumen	13 Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	62,50	18 Dokumen	31,03
2	13.5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	106 Dokumen	1 Dokumen	0	0		
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				100 Persen				
2	8.2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif			99 Persen				

2	8.2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender			96.01 Persen				
2	8.2	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Perangkat Daerah	60 Orang	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100,00	29 Perangkat Daerah	100,00
2	8.2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender			55.01 Persen				
2	8.2	2.02	04	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00	5 Dokumen	62,50
2	8.4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga			0.30 Persen				
2	8.4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalm mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak			100 Persen				
2	8.4	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	4 Lembaga	0	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00	4 Lembaga	100,00
2	8.6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kekerasan Terhadap Anak			0.001 Persen				
2	8.6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak			100 Persen				

2	8.6	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	0	4 Organisasi	4 Organisasi	100,00	4 Organisasi	100,00
2	8.6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak			100 Persen				
2	8.6	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	100,00

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengurus LKD
4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang peran dan fungsi lembaga usaha ekonomi desa (BUMDes, TTG dan Kawasan Perdesaan)
5. Dampak perubahan regulasi pada Lembaga Ekonomi Desa
6. Pengawasan pelestrarian asset dari program nasional sangat lemah.
7. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pengisian data profil desa yang berbasis website.
8. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pembentukan produk hokum desa.
9. Belum adanya dokumen terkait penetapan dan penegasan batas desa.
10. Penataan asset desa belum maksimal.
11. Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan PPRG dan pelatihan pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan.
12. Pengembangan PUSPAGA harus bias sampai ke desa.
13. Peningkatan kapasitas SDM dalam pendampingan kasus dan penanganan anak harus tetap dilakukan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2023

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebanyak 9 (sembilan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 32 (tigapuluh dua) sub kegiatan. Sumber Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1 Fasilitasi KerjaSama antar Desa

1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

III. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

2) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;

3) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

4) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

5) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;

6) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang

Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

V. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

2 Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dari bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2023							
						SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN	Kab. Sidrap	100 Persen	3.976.357.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	3.906.091.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	3.176.357.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	2.691.091.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Sidrap	12 Bulan	14.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	12 Bulan	14.000.000	Aparatur
2	13.1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kab. Sidrap	2 Dokumen	2.829.000	Aparatur	Kab. Sidrap	2 Dokumen	2.829.000	Aparatur
2	13.1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur

2	13.1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur
2	13.1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur
2	13.1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.264.000	Aparatur
2	13.1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidrap	2 Laporan	2.115.000	Aparatur	Kab. Sidrap	2 Laporan	2.115.000	Aparatur
2	13.1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	2.801.691.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	2.307.431.000	Aparatur
2	13.1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidrap	31 Orang	2.789.691.000	Aparatur	Kab. Sidrap	31 Orang	2.294.425.000	Aparatur
2	13.1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Sidrap	1 Laporan	12.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Laporan	13.006.000	Aparatur

2	13.1	2.06		Admnistrasi Umum Peangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	101.060.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	101.060.000	Aparatur
2	13.1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	166 Laporan	101.060.000	Aparatur	Kab. Sidrap	166 Laporan	101.060.000	Aparatur
2	13.1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	199.600.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	192.474.000	Aparatur
2	13.1	2.08	2	Penyediaan Jasa Konmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Sidrap	12 Laporan	42.720.000	Aparatur	Kab. Sidrap	12 Laporan	42.000.000	Aparatur
2	13.1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Sidrap	12 Lporan	156.880.000	Aparatur	Kab. Sidrap	12 Lporan	150.474.000	Aparatur
2	13.1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	60.006.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	76.126.000	Aparatur
2	13.1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Sidrap	16 Unit	55.260.000	Aparatur	Kab. Sidrap	16 Unit	71.380.000	Aparatur
2	13.1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Sidrap	10 Unit	4.746.000	Aparatur	Kab. Sidrap	10 Unit	4.746.000	Aparatur
2	13.3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang telah menjalin perknjian kerjasama	Kab. Sidrap	100 Persen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.3	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan kerja sama desa	Kab. Sidrap	100 Persen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Sidrap	1 Dokumen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	1 Dokumen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Kab. Sidrap	25.00 Persen	512.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	25.00 Persen	502.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan administrasi tatakelola pemerintahan desa	Kab. Sidrap	100 Persen	512.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	502.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	Kab. Sidrap	19 Dokumen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	19 Dokumen	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab. Sidrap	1 Laporan	455.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	1 Laporan	445.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Sidrap	68 Desa	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Desa	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa/ kelurahan dengan kemasyarakatan lembaga desa/ kelurahan yang aktif	Kab. Sidrap	100 Persen	275.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	700.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga desa/ kelurahan yang dibina	Kab. Sidrap	100 Persen	275.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	700.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	5 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	5 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidrap	21 Lembaga	40.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	21 Lembaga	40.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	27 Unit	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	27 Unit	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sidrap	1 Laporan	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	1 Laporan	12.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Sidrap	8 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	8 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidrap	1 Dokumen	200.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	1 Dokumen	625.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kab. Sidrap	100 Persen	585.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	742.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	Kab. Sidrap	99 Persen	494.591.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	99 Persen	652.851.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	Kab. Sidrap	96.01 Persen	44.591.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	96.01 Persen	47.041.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	44.591.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	47.041.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	Kab. Sidrap	96.01 Persen	450.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	96.01 Persen	605.810.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.2	2.02	4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	4 Dokumen	450.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	4 Dokumen	605.810.000	Aparatur dan Masyarakat

2	8.4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	Kab. Sidrap	0.30 Persen	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	0.30 Persen	24.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.4	2.01		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Kab. Sidrap	100 Persen	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	24.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.4	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	Kab. Sidrap	4 Lembaga	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	4 Lembaga	24.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kekerasan Terhadap Anak	Kab. Sidrap	0.001 Persen	70.409.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	0.001 Persen	65.149.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	49.409.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	41.149.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Sidrap	4 Organisasi	49.409.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	4 Organisasi	41.149.000	Aparatur dan Masyarakat

2	8.6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	21.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	24.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Junmlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	2 Dokumen	21.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	2 Dokumen	24.000.000	Aparatur dan Masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan visi dan misi daerah serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang dan seluruh staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P). Implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pangkajene Sidenreng, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMDES DAN PPA,

H.ABBAS ARAS, SP.M.AP

Nip. 19651231 198711 1 013